

TUJUAN (POKIN LEVEL 1)		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah														
INDIKATOR TUJUAN (POKIN LEVEL 1)		Nilai Reformasi Birokrasi														
SASARAN (POKIN LEVEL 2)		Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Menurunnya potensi penyimpangan penyelenggaraan pelayanan publik		Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat		Meningkatnya kualitas kebijakan daerah		Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa		
INDIKATOR SASARAN (POKIN LEVEL 2)		Nilai Pelaporan Kinerja		Nilai LPPD		Indeks Pelayanan Publik		Nilai MalAdministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik		indeks kepuasan masyarakat		1. Indeks Kualitas Kebijakan 2. Indeks Reformasi Hukum		Indeks Tata Kelola Pengadaan		
PROGRAM (SIPD)		1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			3. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESRA			
SASARAN PROGRAM (POKIN LEVEL 3)		1.1. meningkatnya kesesuaian LKJIP dengan Permenpan 53 tahun 2014	1.2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kebutuhan ASN	1.3. Meningkatnya kualitas evaluasi jabatan ASN	1.4. Meningkatnya kualitas standar pelayanan publik sesuai pedoman pada permenpan 15 tahun 2014	1.5. Meningkatkan transparansi informasi penyelenggaraan layanan publik.	1.6. Meningkatkan pengawasan dan perbaikan atas penyelenggaraan layanan publik.	1.7. meningkatnya ketepatan waktu layanan	1.8. Meningkatkan transparansi informasi persyaratan penyelenggaraan layanan publik.	2.1. Meningkatkan efektifitas penggunaan sumber daya (APBD)	2.2. meningkatnya kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa	2.3. Meningkatkan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa.	3.1. meningkatnya kesesuaian LPPD dengan pedoman penyusunan LPPD	3.2. terlaksananya Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi	3.3. terlaksananya keberlanjutan kebijakan	3.4. Meningkatkan transparansi informasi kebijakan
INDIKATOR PROGRAM (POKIN LEVEL 3)		persentase OPD yang menyusun LKJIP dengan Permenpan 53 tahun 2014	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen Anjab, ABK, dan Peta Jabatan yang valid dan mutakhir	Persentase jabatan ASN yang dievaluasi sesuai standar (anjab abk)	Persentase unit layanan yang memenuhi komponen standar pelayanan sesuai pedoman pada permenpan 15 tahun 2014	Persentase standar pelayanan yang dipublikasi pada SIPPN	Persentase unit layanan dengan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik minimal 4	persentase UP dengan nilai unsur ketepatan waktu layanan minimal 3.5	Persentase persyaratan layanan yang dipublikasikan	persentase perangkat daerah dengan Capaian kinerja APBD minimal 80%	persentase Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan dalam SIRUP	persentase PPK yang memiliki sertifikat minimal tipe c	persentase data dukung IKK yang sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD	jumlah perda dan perbup yang dilakukan harmonisasi	persentase perda yang ditindaklanjui dengan perbup	persentase kebijakan yang di publikasi melalui JDIH Gresik
KEGIATAN (SIPD)		1.1. PENATAAN ORGANISASI								1.2. ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	2.1. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.2. PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.1. ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	3.2. FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		
SASARAN KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)		1.1.1. Tersusunnya Laporan kinerja OPD tepat waktu	1.1.2. Meningkatnya kompetensi SDM Perangkat Daerah dalam Pelaporan Kinerja	1.1.3. Pendampingan Penyusunan Anjab dan verifikasi perhitungan beban kerja	1.1.4. verifikasi perhitungan beban kerja	1.1.5. terlaksananya reviu standar pelayanan	1.1.6. melaksanakan update standar pelayanan pada SIPPN	1.1.7. terlaksananya evaluasi data dukung PEKPPP	1.1.8. meningkatnya kualitas SOP	1.2.1. Administrasi Barang Milik Daerah	2.1.1. Meningkatnya kesesuaian penyerapan APBD dengan Time schedule / Rencana anggaran kas (RAK)	2.2.1. Tersedianya dokumen rencana umum pengadaan perangkat daerah yang telah diverifikasi.	3.1.1. meningkatnya kualitas data dukung IKK	3.2.1. terlaksananya public hearing	3.2.2. terlaksananya evaluasi kebijakan berbasis bukti (evidence based)	3.2.3. terlaksananya dokumentasi produk hukum,
INDIKATOR KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)		Jumlah OPD yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	Persentase peserta pelatihan penyusunan pelaporan kinerja yang hasil pre test dan post testnya mengalami peningkatan	Jumlah OPD yang didampingi dalam penyusunan Anjab	Jumlah OPD yang diverifikasiperhitun gan beban kerja	Persentase UP yang melakukan reviu SP	jumlah UP yang melakukan Update standar pelayanan pada SIPPN	persentase UP yang dievaluasi data dukungnya	Jumlah SOP yang di evaluasi	Laporan Adm Barang sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Perangkat daerah dengan penyerapan APBD sesuai RAK	Jumlah dokumen RUP yang telah diverifikasi.	Indikator Kinerja : persentasi data dukung IKK yang terverifikasi	jumlah kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat	jumlah kebijakan yang di evaluasi	persentase produk hukum yang di dokumentasikan
SUB KEGIATAN (SIPD)		1.1.1.1. PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.1.2.1. PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.1.3.1. PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	1.1.4.1. PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	1.1.5.1. FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA	1.1.6.1. FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA	1.1.7.1. FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA	1.1.8.1. FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA	1.2.1.1. PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH KEPADA SKPD	2.1.1.1. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	2.2.1.1. PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.1.1.1. PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	3.2.1.1. FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	3.2.2.1. FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	3.2.3.1. PENDOKUMENTASI AN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM
SASARAN SUB KEGIATAN (SIPD)		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
INDIKATOR SUB KEGIATAN (SIPD)		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi